

Menjadi Politisi Profesional

ADA yang sulit diwujudkan dalam praktik politik hari ini. Keinginan banyak pihak agar proses politik di lembaga legislatif menghasilkan kebijakan yang pro rakyat ternyata masih jauh dari harapan. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kompetensi wakil rakyat yang



Asrinaldi A

Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand

ada. Ini bermula dari belum berlangsungnya seleksi dan nominasi yang ketat terhadap calon anggota DPR/DPRD justru berdampak pada kualitas mereka dalam melaksanakan fungsi lembaga tersebut. Idealnya menjadi anggota DPR/DPRD memang membutuhkan kompetensi khusus agar profesionalisme mereka sebagai wakil rakyat benar-benar dapat dilaksanakan.

Menjelang tahapan pemilu berikutnya, yaitu pendaftaran calon anggota DPR/DPRD yang dilaksanakan bulan Juli 2018, terlihat sudah banyak partai politik yang melakukan rekrutmen politik secara terbuka.

Sayangnya, proses rekrutmen politik itu tidak mengkhususkan pada pemenuhan syarat kompetensi sebagai politisi profesional. Justru yang terlihat, partai hanya sekadar memenuhi syarat formal UU saja. Publik pun maklum bahwa UU No 7/2017 sebagai dasar pelaksanaan pemilu tahun 2019 memiliki banyak kelemahan, karena dihasilkan dari proses tawar-menawar politik jangka pendek. Proses ini hanya mengakomodir kepentingan partai politik saja. Akibatnya hasil pemilu yang berkualitas pun akan sulit diwujudkan.

Politisi Profesional

Bagi sebagian orang menjadi anggota DPR/DPRD adalah "pekerjaan" yang menjanjikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menjadi politisi tidak lagi sekadar

memperjuangkan idealisme politik, tapi juga memperjuangkan kebutuhan hidup seperti pengakuan diri, status sosial, privilese dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pergeseran motivasi yang menjadikan anggota DPR/DPRD sebagai pekerjaan dan dibayar karena pekerjaan itu, maka disebut sebagai politisi profesional (*professional politician*). Sama halnya dengan pekerjaan lain seperti menjadi pengacara, dokter, perawat, insinyur, dosen, guru, akuntan dan profesi lainnya. Jelas mereka dibayar karena profesi yang ditekuni tersebut.

Namun, untuk menjadi profesional dalam suatu pekerjaan, tentu mereka harus menempuh jalur pendidikan formal, serta mengikuti ujian kelulusan. Ini dimaksudkan agar mereka mendapat pengakuan, sehingga disebut sebagai profe-

sional. Malah sebelum menjadi profesional di bidang masing-masing, mereka juga harus melalui serangkaian ujian profesi agar mereka betul-betul profesional dan bertanggung jawab dengan pekerjaan dihadapan publik.

Sayangnya, ketika keinginan sebagian besar masyarakat menjadi anggota DPR/DPRD, justru mereka mengabaikan syarat untuk menjadi profesional ini. Faktanya, tidak semua politisi memahami hakikat politik yang sesungguhnya. Kebanyakan dari mereka tidak

belajar politik secara formal dan hanya mengandalkan pengalaman *an sich*. Celakanya pengalaman yang dilalui politisi itu pun tidak memiliki standar yang sama. Akibatnya yang muncul adalah perbedaan dalam memahami permasalahan politik dan pemerintahan yang diperde-


batkan. Dan sudah pasti perdebatan yang berlangsung di antara mereka tidak akan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Idealnya, jika memang menjadi anggota DPR/DPRD adalah bagian dari pekerjaan yang dicari oleh semua orang, paling tidak mereka memiliki ilmu yang cukup di bidang pekerjaan yang akan mereka tekuni. Sudah tentu harus ada pengakuan dari publik terhadap kompetensi yang mereka miliki sebagai politisi tersebut. Inilah dasar mereka bisa diajukan sebagai calon anggota DPR/DPRD oleh partai politik. Jadi bukan sembarang orang yang bisa direkrut menjadi calon anggota DPR/DPRD sebagaimana yang berlangsung selama ini. Karena ketika menjadi anggota DPR/DPRD hajat hidup orang banyak sangat bergantung kepada politisi tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau tanggung jawab ini diberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang fungsi DPR/DPRD.

Mengubah Paradigma

Elite partai di negeri ini harus belajar dari partai politik di negara yang mapan berdemokrasi ketika memilih calon anggota DPR/DPRD-nya. Menjadi politisi di negara maju bukanlah berasal dari orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan apalagi orang yang bergabung sebagai anggota partai politik. Di Ing-

gris, seseorang yang mau jadi politisi profesional sudah harus terlibat aktif di partai politik selama bertahun-tahun. Mereka harus memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan fungsi partai politik dan parlemen yang akan mereka masuki. Sebelumnya, mereka harus mengabdikan atau mengabdikan diri menjadi kelompok pemikir partai politik atau sebagai tenaga peneliti terkait dengan isu-isu yang bersinggungan dengan platform partai mereka. Tidak jarang mereka juga bersedia menjadi relawan partai



Idealnya, jika memang menjadi anggota DPR/DPRD adalah bagian dari pekerjaan yang dicari oleh semua orang, paling tidak mereka memiliki ilmu yang cukup di bidang pekerjaan yang akan mereka tekuni. Sudah tentu harus ada pengakuan dari publik terhadap kompetensi yang mereka miliki sebagai politisi tersebut.

untuk mengurus konstituen agar tetap setia dan loyal kepada partai mereka. Dengan pengalaman dan latar belakang itu mereka baru berani mengajukan diri untuk mengikuti kontestasi menjadi anggota parlemen. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang proses rekrutmen politiknya jauh dari standar untuk menjadi politisi profesional.

Sudah saatnya elite partai politik mulai mengubah paradigma berpolitik yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Mestinya partai politik harus bisa menyiapkan kader-kader calon pemimpin bangsa yang bukan berasal dari politisi karbitan. Melihat kecenderungan yang ada, umumnya partai justru mengajukan calon anggota DPR/DPRD berasal dari kalangan pesohor, keluarga atau mereka yang memiliki uang. Bahkan pengurus partai tidak peduli apakah mereka yang diajukan ini memiliki latar belakang dan pengalaman berpolitik atau tidak. Yang penting mereka bisa menguntungkan partai dalam jangka pendek.

Sebenarnya upaya mengatur agar pemilu ini dapat menghasilkan politisi profesional sudah menjadi pembicaraan mendalam dari kalangan masyarakat sipil yang peduli. Sayangnya, keinginan ini mentah ketika pembahasan UU No 7/2017 yang dilakukan elite partai hanya berorientasi pada kepentingan partai politik. Padahal dengan memasukkan syarat ini jelas berdampak signifikan pada kualitas anggota DPR/DPRD yang muaranya pada kapasitas kebijakan publik yang akan dihasilkan. Sayangnya aspek ini belum menjadi perhatian elite partai politik dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Karenanya tidak heran muncul kekhawatiran masyarakat bahwa kualitas anggota DPR/DPRD yang akan dihasilkan pemilu tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan yang sekarang.

(*)